



Penyerahan DIPA 2018, Gubernur Marah-marah

Acara Amburadul, Kecewa Kepala Daerah Tak Hadir

PONTIANAK-RK. Gubernur Kalbar Cornelis dengan nada tinggi menegur sejumlah kepala daerah yang tidak hadir saat penyerahan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 kepada Satuan Kerja Pengelolaan Dana APBN di Balai Petitih Kantor Gubernur, Selasa (14/12). Cornelis juga

mempertanyakan ketidakhadiran Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya yang tidak hadir pada penyerahan itu. "Kemana Wagub, seyogyanya harus

hadir karena ini terakhir. Kami tidak mungkin maju lagi," tanya Cornelis saat memberikan sambutan. Cornelis menceritakan perjuangan-

nya yang harus melawan macet selama tiga jam, bahkan naik pesawat tak turun-turun.

Halaman 4



Acara Amburadul, Kecewa Kepala Daerah Tak Hadir

Perjuangannya tersebut malah harus menyaksikan ketidakhadiran kepala daerah yang telah diundang secara hormat. "Sekarang diundang dengan terhormat mengambil uangnya, bayangkan ada yang mengirimkan wakil akhirnya tidak mengambil karena harus menandatangani pakta integritas," ujarnya pada penyerahan DIPA 2018 itu yang dihadiri Bupati Kayong Utara Hilid Hamid, Bupati Kapuas Hulu AM Nasir, Bupati Melawi Panji, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili, Wali Kota Singkawang Awang Ishak, Bupati Mempawah Ria Norsan, Bupati Ketapang Martin Rantan, Bupati Kubu Raya Rusman Ali, Bupati Landak Karolin Margret Natasa, Bupati Sanggau Paulus Hadi, Bupati Sintang Jarot Winarno, Bupati Sekadau Rupinus dan Wakil Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono tersebut.

Menurut Cornelis, penandatanganan pakta integritas dilakukan agar tidak ada penyelewengan. Karena keuangan negara yang dikucurkan pemerintah pusat harus dikelola

nyaman. Secara pribadi, bapak ibu tidak ada persoalan dengan saya," terang Cornelis.

"Timbul persoalan ini dalam penyelenggaraan pemerintah, saya dengan segala kerendahan hati mohon dimaafkan," timpal Cornelis.

Sementara terkait DIPA 2018 yang diterima, jumlahnya lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Yaitu mencapai Rp9,9 triliun dengan jumlah penerima 552 DIPA. Sedangkan tahun 2017, sebesar Rp8,8 triliun dengan jumlah penerima 547 DIPA. Cornelis mengingatkan agar satuan kerja pengelola anggaran tidak lalai. Penggunaannya pun harus sesuai dengan undang-undang.

"Anggaran diberikan itu agar bermanfaat untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan lalai juga memberikan gaji pegawai, saya akan memonitor itu," kata Cornelis.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendahaan Kalbar Sahat M. T Pangabean mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi tantangan sebagai bentuk

sesuai undang-undang. "Ini yang tinggal terima, susah payah. Bukan mencari uang, tapi tinggal pakai saja," sesalnya.

Cornelis mengungkapkan, dirinya tak pernah absen saat diundang presiden, terkecuali dirinya sakit.

"Pak SBY, tidak pernah berterima kasih kepada gubernur dan bupati, karena anda wajib datang. Itu tugas anda. Begitu juga saya tidak berterima kasih dengan anda, karena itu tugas anda," kata Cornelis dengan nada tinggi.

Gubernur dua periode ini menilai ketidakhadiran tersebut menunjukkan ketidaksungguhan pimpinan mengurus daerahnya masing-masing. Padahal uang ini sangat penting. Para ahli sarjana keuangan dari Prancis mengatakan, uang itu sama dengan darah di dalam tubuh. "Jika tidak punya uang bagaimana menjalankan roda organisasi ini," ketus Cornelis.

Tak hanya soal ketidakhadiran, Mantan Bupati Landak ini juga mengkritik susunan acara penyerahan DIPA tersebut. "Susunan acara pun amburadul, lintang-pukang,

evaluasi belanja negara. Di antaranya perbaikan efektivitas belanja negara agar betul-betul berbasis output dan memberikan manfaat yang optimal pada pencapaian sasaran pembangunan.

"Terutama pemerataan pembangunan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan," katanya.

Selanjutnya pada efisiensi belanja operasional pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Perencanaan penganggarannya harus lebih matang dan komprehensif oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta antar pusat dan daerah, dan antar kementerian/lembaga. Kemudian peningkatan sistem monitoring dan evaluasi anggaran serta perbaikan tata kelola keuangan, dari mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. "Kemudian pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan penggunaan

dana anggaran dari pusat hingga ke daerah dan desa," tuturnya.

duduk berdiri, entah mana kepala dinas, ke mana siapa. Tidak pernah tertib, sudahlah susunan salah-salah. Jika pimpinan tidak tertib, bagaimana dengan rakyat? Lebih tidak tertib lagi," seloroh mantan Camat Menjalin itu.

Kritikan itu harus disampaikan Cornelis tanpa didasari rasa senang atau tidak, karena sudah menjadi tuntutan undang-undang. Menurutnya, senang tidak senang, harus dia sampaikan. "Seperti tadi wakil tidak boleh menerima, karena harus menandatangani pakta integritas. Jadi saya mohon maaf, bukan tidak mengharga, tapi ini adalah aturan mainnya," tukasnya.

Kendati demikian ia memastikan tidak ada persoalan pribadi dengan sejumlah pimpinan daerah. Terkecuali, berkaitan dengan persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Dalam penyelenggaraan pemerintah ini yang selalu menjadi persoalan dan tidak sesuai dengan keinginan kita, selaku kepala daerah belum puas dengan apa yang dikerjakan. Ini yang membuat tidak

Menurut Sahat, tantangan yang masih dihadapi tentunya terus diperbaiki. Supaya dapat berbuat yang terbaik untuk masyarakat serta menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

"Dukungan dan peranan seluruh pimpinan satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran serta para bupati dan wali kota, sangat penting dalam mengawasi dan mengendalikan terlaksananya seluruh amanat yang tertuang dalam DIPA," papar Sahat.

Penyerahan DIPA Tahun 2018 ini bersamaan dengan penandatanganan pakta integritas terhadap para kuasa pengguna anggaran. Pada acara tersebut juga diserahkan penghargaan laporan keuangan tahun 2016 yang memperoleh opini WTP kepada sembilan Pemda. Yaitu Pemprov Kalbar, Pemkot Pontianak, Pemkab Sintang, Pemkab Sekadau, Pemkab Sanggau, Pemkab Landak, Pemkab Kubu Raya, Pemkab Ketapang dan Pemkab Mempawah.

Laporan: Rizka Nanda
Editor: Arman Hairidi